KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Open Parliament Babak Baru Demokrasi Indonesia, Fadli: Kami Hadirkan DPR Dalam Genggaman Rakyat
Tanggal : Jumat, 05 April 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

OPEN PARLIAMENT BABAK BARU DEMOKRASI INDONESIA

Fadli: Kami Hadirkan DPR Dalam Genggaman Rakyat



Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menegaskan, DPR telah resmi bergabung dengan gerakan global menuju rezim keterbukaan. Menurutnya, "Open Parliament" menandai babak baru praktik demokrasi di Indonesia yang sudah melalui berbagai fase, mulai dari demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan kini kembali menjadi demokratis terbuka.

INDONESIA terus mencari bentuk pelembagaan demokrasi yang cocok dalam membangun kultur yang lebih kuat dan terkonsolidasi.

"Perjalanan demokrasi memiliki caranya sendiri. Tak ada satupun ukuran yang cocok untuk semua. Demokrasi harus dibangun di atas kearifan lokal masing-masing negara dan disesuaikan dengan konteks sosial, budaya dan politik nasional yang berbeda-beda," ujar Fadli saat membuka "Asia Regional Meeting on Open Parliament" di Nusa Dua, Bali, kemarin.

Fadli menuturkan, pertemuan regional yang dihadiri oleh delegasi dari delapan negara ini merupakan babak baru dari komitmen Open Government Partnership (OGP). OGP merupakan inisiatif multilateral yang dicetuskan pada 2011 untuk mempromosikan pemerintahan terbuka (open government), memerangi korupsi, memberdayakan masyarakat, dan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.

"OGP diluncurkan pada 20 September 2011 di selasela pertemuan Majelis Umum PBB oleh kepala negara dan pemerintahan dari delapan negara pendiri, yaitu Brasil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat. Ketika OGP diluncurkan, isu keterbukaan parlemen belum tersentuh. Keterbukaan parlemen mulai jadi tema penting pada 2013, ketika kelompok kerja tematis baru tentang keterbukaan legislatif diperkenalkan pada KTT OGP di London," urainya.

Fadli membahkan, komitmen tentang keterbukaan parlemen penting untuk diadopsi oleh semua negara. Apalagi, sebuah studi baru-baru ini mengungkapkan, sebagian besar negara demokrasi, kurang dari setengah warga negara yang mempercayai parlemen. Contohnya di Amerika Serikat, menurut data 2018 yang dikumpulkan oleh Gallup, kepercayaan pada legislatif hanya mencapai 40 persen.

"Di Indonesia, menurut sejumlah survei, tingkat kepercayaan publik juga masih rendah. Survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap parlemen sekitar 49 persen. Sesudah DPR melakukan Deklarasi Parlemen Terbuka, pada Desember 2018 lalu, kepercayaan publik terhadap parlemen mencapai 60 persen. 'Open Parliament' menandai babak baru praktik berdemokrasi di Indonesia," tuturnya.

Dalam pidatonya, Fadli juga menyinggung tentang banyaknya pengguna media sosial di Indonesia. Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu negara pengguna media sosial paling aktif di dunia, sehingga DPR memandang komitmen parlemen terbuka juga harus menyesuaikan dengan gaya hidup digital warga negara. Komitmen keterbukaan parlemen harus tersedia secara digital, mudah diakses oleh media sosial.

"Saat ini, pengguna media sosial di Indonesia lebih dari 88 juta. Di era digital seperti sekarang, cara untuk mengakomodasi aspirasi konstituen tak hanya bersifat konvensional melalui tatap muka, tapi bisa dilakukan melalui media sosial. Itu latar belakang DPR meluncurkan aplikasi mobile 'DPR Now!', alat untuk menjembatani informasi antara DPR dengan masyarakat," jelas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini.

Saat ini, sambung dia, DPR juga sedang bekerja untuk membuat informasi parlemen yang lebih transparan, lebih up to date, melalui pengembangan Sistem Informasi Legislatif (SILEG). Sistem tersebut akan memantau semua proses legislasi yang ada di Senayan, sehingga DPR mampu menyediakan produk legislatif yang lebih baik dan lebih akomodatif terhadap kepentingan rakyat.

"Pada intinya, DPR sedang mencari cara terbaik untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses pembuatan perundang-undangan melalui pemanfaatan teknologi digital. Sebuah proyek percontohan telah dikembangkan melalui partisipasi publik dalam Sistem Perancangan Legislatif, saluran berbasis web untuk memastikan aspirasi dan pendapat publik bisa disalurkan melalui mekanisme online. Itulah tujuan dari komitmen Parlemen Terbuka," tandasnya. ■ ONI/TIM

